

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan organisasi membuat permasalahan yang harus dihadapi menjadi semakin kompleks. Permasalahan tersebut mengharuskan organisasi untuk membuat suatu manajemen organisasi yang disebut perencanaan sebelum melakukan kegiatan. Manajemen merupakan seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi aktivitas perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), serta pengendalian (*controlling*). Serangkaian aktivitas tersebut guna tercapainya sasaran organisasi yang telah ditetapkan (Sukarna., 2011:10). Salah satu perencanaan yang dapat dilakukan oleh organisasi adalah menyusun anggaran atau dengan nama lain *budget*. Perencanaan yang merupakan bentuk manajemen, adalah tindakan berdasarkan fakta serta asumsi mengenai gambaran suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang dilakukan pada waktu mendatang. Perencanaan ialah penentuan awal suatu kegiatan yang kemungkinan dapat dilakukan serta bagaimana melakukannya. Suatu kegiatan dikatakan berhasil atas pencapaian tujuan yang efektif dan efisien apabila matang dalam perencanaan, organisasi yang terstruktur, serta baiknya pengelolaan.

Organisasi akan sukar berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen, dimana segala aktivitasnya direncanakan secara cermat dan tepat. Perencanaan (*planning*) ialah salah satu fungsi aktivitas manajemen yang merupakan hal penting dimana harus dilakukan salah satunya pada manajemen pemerintahan. Budi Supriyanto (2009:24) menyatakan bahwa, manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintah oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah, guna mencapai kesejahteraan rakyat. Segala bentuk aktivitas serta kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah, harus melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan yang baik nantinya akan menghasilkan keluaran (*output*) kegiatan pemerintah yang tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Dalam suatu perencanaan dibutuhkan suatu alat pembantu dalam perencanaan pengalokasian sumber daya pemerintahan yang terbatas. Anggaran menjadi salah satu alat dalam pengelolaan keuangan pemerintahan yang dapat digunakan suatu manajemen.

Anggaran merupakan tindakan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi yang menyangkut perkiraan penerimaan, dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Wati, dkk (2013) menjelaskan bahwa, guna mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien di sektor swasta maupun publik digunakanlah suatu anggaran sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen.

Anggaran sangat berpengaruh baik disektor swasta maupun publik sebagai sistem pengendali. Sektor yang paling berpengaruh salah satunya ialah sektor publik. Dimana anggaran sektor publik yaitu suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan pemerintah, baik pada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran *financial*, dimana memuat informasi mengenai pendapat, belanja, aktivitas dan pembiayaan dalam satuan moneter.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa, anggaran sektor publik merupakan suatu acuan yang dilakukan pemerintah yang meliputi rencana pemasukan, belanja, pengiriman dan pembayaran dalam satuan rupiah yang disusun secara sistematis untuk period tertentu menurut klasifikasi yang ada. Selain itu, anggaran bertujuan untuk mencapai tujuan dan cita-cita pemerintahan yang berperan sebagai alat bantu pemerintah dalam alokasi minimnya sumber dana dan sumber daya alam yang dimiliki (Threzasyari., 2017).

Dampak langsung atas anggaran juga didapati pada perilaku manusia, dimana karyawan merasakan ketatnya anggaran dan buruknya laporan kinerja. Sehingga anggaran kerap kali dipandang sebagai penghalang kemajuan karir karyawan. Oleh karena itu, keikutsertaan atau partisipasi suatu anggaran dapat mendorong adanya penetapan anggaran yang akurat.

Salah satu dampak positif dari partisipasi anggaran yaitu partisipasi penyusunan anggaran, tidak hanya dari atasan tetapi juga bawahan yang diikuti sertakan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan pemahaman pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, partisipasi anggaran juga memberi dampak negatif, salah satunya yaitu partisipasi palsu atau semu dari manajer tingkat bawah, hanya untuk mendapat persetujuan formal atasan agar partisipasi dianggap tidak tercapai. Kondisi seperti inilah yang dapat menimbulkan senjangan anggaran (*budgetary slack*).

Merchant dalam Tresnanty dan Widanaputra., 2015 menjelaskan bahwa, senjangan anggaran (*budgetary slack*) biasanya dilakukan dengan melakukan permainan pada biaya serta pendapatan dari yang seharusnya agar anggaran mudah dicapai. Hal ini dilakukan agar kinerja dapat terlihat baik. Demi peningkatan jenjang karir mereka akan melakukan senjangan anggaran (*budgetary slack*) karena target anggaran yang tidak tercapai. Senjangan anggaran (*budgetary slack*) seringkali terjadi pada tahap perencanaan (*planning*) dan persiapan (*preparing*) anggaran daerah.

Senjangan anggaran (*budgetary slack*) dapat menimbulkan kerugian serta permasalahan dalam suatu organisasi. Masalah penyusunan RAPBD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2015 menjadi salah satu contoh senjangan anggaran (*budgetary slack*). Didapati anggaran yang tidak sesuai fakta dimana anggaran biaya sebesar 12,1 triliun dirancang oleh DPR selaku penyusun anggaran. Gubernur DKI Jakarta menemukan salah satu senjangan (*slack*) pada rancangan

anggaran hasil usulan DPR adalah anggaran biaya sebesar 330 milyar guna pengadaan perangkat elektronik UPS (*uninterruptible power supply*) dengan rincian 5 milyar untuk satu unit UPS (*uninterruptible power supply*). Penetapan harga UPS (*uninterruptible power supply*) tersebut memiliki perbedaan dengan harga pasaran (Ayunda Widiastuti - Detik News dalam <http://news.dektik.com>).

Seringkali pemerintahan dalam mengukur kinerja manajemen menggunakan anggaran sebagai pengukur utama. Bentuk penekanan semacam itu dapat memungkinkan lahirnya senjangan anggaran (*budgetary slack*). Dorongan bawahan untuk menciptakan senjangan anggaran (*budgetary slack*) adalah dengan tercapai atau tidaknya target anggaran bertujuan sebagai penilaian diri serta peningkatan prospek kompensasi.

Informasi yang tidak simetris (asimetri informasi) yaitu kepemilikan informasi antara manajer atas dan bawah yang tidak seimbang. Perwani., 2013 dalam (Sinta., 2017) menyatakan beberapa faktor penyebab senjangan anggaran (*budgetary slack*) pada penyusunan anggaran, diantaranya asimetri informasi karena adanya perbedaan informasi antara atasan dan bawahan (karyawan). Penyusunan anggaran memberikan kesempatan guna memasukan informasi lokal yang dilakukan bawahan.

Suartana (2010:139) mengatakan bahwa dalam penganggaran konsep asimetri informasi terjadi ketika atasan dan bawahan memiliki perbedaan pengetahuan. Kemungkinan pertama apabila atasan memiliki pengetahuan lebih tinggi maka timbul tuntutan atau motivasi dari atasan kepada bawahan

yang terlalu tinggi. Namun, apabila bawahan memiliki pengetahuan lebih tinggi yang disebut kemungkinan kedua maka bawahan akan menargetkan lebih rendah dari kemungkinan untuk dicapai.

Sehingga dari latar belakang permasalahan diatas, dipilih judul penelitian yaitu **“Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi Sebagai Variabel Moderasi Pada 10 Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diambil, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Partisipasi Anggaran mempengaruhi suatu Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*) ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*) dengan Asimetri Informasi sebagai Variabel Moderasi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*).
2. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*) dengan Asimetri Informasi sebagai Variabel Moderasi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang

STIE PGRI Dewantara Jombang mendapatkan umpan balik terhadap proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*).

2. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat mengimplementasikan apa yang telah diajarkan di bangku perkuliahan dalam dunia akuntansi yang sesungguhnya.

3. Bagi Peneliti Lain

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi serta pengetahuan mengenai Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Organisasi Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran Partisipasi Anggaran terhadap suatu Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*) didalam dunia Organisasi Pemerintah Daerah.